

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Senin 6 Januari 2025
Wilayah	Kabupaten Luwu Utara



Gaji Telat Bukan Karena DBH Tak Turun

Gaji Telat Bukan karena DBH Tak Turun

MASAMBA, FAJAR — Pemkab Luwu Utara termasuk yang tak mendapatkan dana bagi hasil (DBH). Padahal, DPRD setempat telah berkoordinasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel.

Dewan menyebut keadaan keuangan Pemprov Sulsel tidak dalam kondisi baik. Khusus Lutra, tunggakan pemprov atas DBH telah mencapai enam bulan.

Dana itu tak pernah lagi diterima sebagai hak pemkab.

"Kami langsung koordinasi Bapenda Sulsel, tapi keadaan APBD Provinsi Sulsel juga lagi tidak baik-baik saja," kata Wakil Ketua DPRD Luwu Utara Karimuddin kepada FAJAR, Minggu, 5 Januari 2025.

Untuk itu, hanya enam bulan yang dapat dipenuhi untuk tersalurkan. Setiap bulan Luwu Utara berhak menda-

patkan dana bagi hasil sebanyak Rp3,4 miliar. Artinya dalam satu tahun sebanyak Rp40,8 miliar.

Meski Bapenda Sulsel baru memenuhi pembayaran enam bulan, itu akan dimaksimalkan. Dia menyebut bukan tunggakan DBH yang membuat tunjangan profesi guru, gaji 227 kepala desa, sopir ambulans, dan petugas pemadam kebakaran tersendat.

Legislator PAN Luwu Utara menyebut, tidak ada kaitannya. Menurutnya, urusan gaji itu uang lebih. Jadi kalau ada yang mandek ada salah. Gaji tidak mungkin kurang. "Itu karena siklus keuangan di daerah sudah sakit," ungkap Karimuddin.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Luwu Utara Baharuddin Nurdin akan membarajar tunjangan profesi guru 2024 pada 2025. Surat pem-

yataan telah ditandatangani Baharuddin dan Kadis Pendidikan Misbah.

Sebelumnya, Ketua PGRI Luwu Utara Jamiluddin menyatakan bahwa keresahan para guru sudah tidak dapat dibendung.

"Kami hanya meminta pemerintah memenuhi kewajibannya. Guru membutuhkan hak ini untuk menunjang kehidupan mereka," tegas Jamiluddin. (shd/zuk)